



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR 922/V/VIII/2016



**Sambut Atlet Olimpiade, Ketua DPR RI  
Dukung Peningkatan Anggaran OR**

**DPR RI Catat Ada Perbaikan Kebijakan  
Penyelenggaraan Haji**

**Naikkan Harga Rokok,  
Kebijakan Serampangan dan Tak Bijak**

**GRATIS**  
Tidak Diperjualbelikan



*Ketua DPR RI Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra saat menyambut kedatangan atlet Olimpiade Rio 2016 di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.*

## Sambut Atlet Olimpiade, Ketua DPR RI Dukung Peningkatan Anggaran OR

Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra beserta beberapa anggota DPR RI turut menyambut kedatangan atlet Indonesia yang berhasil mendapatkan medali di Olimpiade Rio 2016 di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Selasa, (23/8).

Ade mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap Kemenpora yang telah membina atlet Indonesia. "Ini ungkapan rasa terima kasih saya dan apresiasi DPR RI terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah bekerja keras mengharumkan Indonesia di mata internasional," ujar Akom, sapaan akrabnya.

Politisi Partai Golkar ini pun mengucapkan kebanggaannya kepada atlet Indonesia yang telah mengibarkan bendera merah putih di Brazil dan mendulang medali emas bertepatan dengan HUT RI ke 71.

"Kita patut berbangga, atlet-atlet kita mampu mempertahankan tradisi sebagai penguasa di Asia Tenggara dan bulutangkis masih menjadi pendulang emas olimpiade," terangnya.

Terkait dengan pembinaan atlet untuk kedepan, Akom akan segera berkoordinasi dengan Komisi X untuk dapat dimaksimalkan.

Maka, DPR RI akan mengusulkan tambahan anggaran pembinaan atlet. Menurut Politisi Golkar ini, pembinaan atlet menjadi kunci suksesnya prestasi.

Salah satu upaya pembinaan atlet adalah revitisasi fasilitas latihan seperti wisma. "Di antaranya dengan melakukan revitalisasi besar-besaran fasilitas pendukung latihan, seperti wisma-wisma dan pusat pelatihan terpadu," ujarnya.

Selain mengupayakan tambahan anggaran, Akom juga mendorong Kemenpora untuk terus dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi sponsor event-event olahraga.

Akom juga mengusulkan Kemenpora untuk membuat yayasan pembinaan atlet dengan menggandeng BUMN dan pihak swasta.

Sehingga dengan persiapan dan kerjasama yang matang, kompetisi rutin dapat terselenggara. "Terpenting kompetisi di tingkat daerah dan nasional harus rutin digulirkan dan harus mendapatkan exposure yang besar dari media massa dengan pembiayaan sharing pemerintah dengan swasta," tutur Akom.

Alumni UIN Jakarta ini pun yakin jika segalanya dikoordinasikan dengan matang antara Pemerintah, DPR RI dan swasta, generasi muda Indonesia optimis terhadap profesi olahraga bisa mendapatkan kesejahteraan. "Jadi anak-anak muda kita optimis profesi sebagai olahragawan bisa menghidupi," tutur Akom.

Sebagaimana diketahui, Indonesia menempati peringkat 46 pada Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil, di 2016 ini. ■

## Kinerja Baik DPR RI Harus Diimbangi Pemberitaan yang Baik

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengunjungi Kantor Redaksi Tribun News untuk silaturahmi dengan seluruh staf dan berdiskusi tentang isu terkini. Dalam kesempatan tersebut, Akom menjelaskan sejak dirinya didaulat sebagai Ketua DPR RI, ia fokus dalam meningkatkan kinerja DPR RI dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Namun pemberitaan yang terjadi tidak dilakukan secara seimbang.

“Nah, saya mengucapkan terima kasih atas pemberitaan Tribun News selama ini yang menurut saya sangat baik. Sejak saya dilantik pada 11 Januari, sepanjang jadi pimpinan saya sudah berusaha memperbaiki keadaan,” ujarnya di Kantor Tribun News, Jakarta pada Senin, (22/8).

Dalam kesempatan tersebut, beberapa isu dibahas. Diantaranya mengenai kinerja DPR RI dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Dalam bidang legislasi, Akom menjelaskan sudah berupaya untuk meningkatkan kinerja di bidang legislasi, hal itu terbukti dengan telah disahkan 12 undang-undang dalam kepemimpinannya.

"Sejak dilantik bulan Januari, saya fokus pada legislasi agar lebih produktif. Sekarang sudah ada 12 UU. Kita juga ingin dalam hal legislasi juga menghasilkan kualitas," paparnya.

Di bidang anggaran, ia juga menjelaskan telah melakukan efisiensi. Mengenai pembangunan Gedung DPR RI, ia menjelaskan bahwa sejak awal tidak menginginkan adanya pembangunan gedung baru DPR RI. Namun berkat hasil diskusi dengan cendekiawan yang memiliki gagasan untuk membangun perpustakaan terbesar se-ASEAN, ia mulai tertarik untuk membangunnya.



Ketua DPR RI Ade Komarudin saat mengunjungi Kantor Redaksi Tribun News.

"Saya tidak begitu tertarik dari awal untuk bangun gedung baru, tapi ketika ada usul mengenai gagasan pentingnya membaca buku dan semangat mengejar pengetahuan. Maka dari pada anggaran dibuat untuk membangun Gedung DPR RI baru, lebih baik dibuat perpustakaan umum yang besar, itu lebih bermanfaat," papar Akom.

Namun, setelah rencana itu dipublikasi, secara ramai-ramai media menganggap negatif rencana baik tersebut. "Gagasan dan niat yang baik pun juga tetap saja dianggap tidak baik oleh masyarakat," sambungnya.

Di bidang pengawasan, Akom pun menjelaskan tidak ingin terjadi moral hazard. Ia pun menegaskan tidak ingin

eksekutif dan legislatif bermain-main dalam politik anggaran. Ia pun juga usul agar DPR RI tidak boleh membahas anggaran sampai satuan tiga.

"Saya tak mau ada moral hazard itu, bagaimana cara agar eksekutif dan legislatif tak ada bermain dalam penyusunan anggaran. Kita sudah usul DPR RI tidak boleh bahas sampai satuan tiga," tegasnya.

Ia pun juga terus mencari pola pembahasan agar tidak terjadi lubang kosong sehingga aparatur tidak bermain anggaran demi kepentingan pribadi dan kelompok. "Saya ingin cari pola pembahasan agar terjadi tak ada lubang kosong sehingga bisa mempermainkan anggaran demi kepentingan pribadi," tuturnya,

Ia pun menginginkan ke depan, pemberitaan tentang DPR RI dapat dilakukan secara berimbang. Jika ada kinerja DPR RI yang buruk, Akom mempersilahkan media untuk diberitakan. Namun bukan berarti prestasi DPR RI yang selama ini dicapai tidak mendapatkan perhatian media. Ketidakseimbangan informasi ini berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada DPR RI. Padahal DPR RI adalah tulang punggung demokrasi dan tempat bagi rakyat untuk memperjuangkan aspirasinya. ■

(ber.mpr) foto: kreano/hr



**PENGAWAS UMUM** Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Ariaindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budliati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

**PIMPINAN PENERBITAN** Djujawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

[ ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN ]

## Tumbuhkan Rasa Nasionalisme, DPR RI Gelar Pesta Rakyat

Usai membuka acara lomba mewarnai untuk anak-anak dalam rangka memeriahkan peringatan hari kemerdekaan RI sekaligus HUT DPR RI yang ke 71, yang digelar di lobby Gedung Nusantara III, Ketua DPR RI Ade Komarudin langsung menuju lokasi lomba panjat bambu betung. Namun sebelum tiba di lokasi tersebut, pria yang akrab disapa Akom itu menyempatkan diri untuk berfoto bersama dengan komunitas motor Vespa di depan anak tangga Gedung Nusantara.

**B**ahkan Akom mencoba mengendarai salah satu scooter yang terparkir disana meski hanya sebentar. Setibanya di lokasi acara lomba panjat bambu betung yang diselenggarakan di lapangan golf mini Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Ade Komarudin memberikan sambutan sekaligus

membuka jalannya lomba tersebut.

"Saya dengan Pak Fadli selaku Pimpinan DPR RI membuka beberapa acara perlombaan pada rangkaian peringatan 17 Agustusan di DPR RI, yang di inisiasi oleh Ibu Sekjen beserta seluruh jajarannya. Acara seperti ini setiap tahun memang selalu diselenggarakan oleh dewan," ucapnya saat memberikan sambutan acara, Sabtu (20/8).

Dengan acara peringatan ini, DPR



*Ketua DPR RI Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ditengah-tengah peserta Lomba Pesta Rakyat.*

RI ingin menumbuhkan rasa nasionalisme di era kompetisi global. Maka lanjut dia, pihaknya ingin membuka rasa nasionalisme baik yang turut hadir di sini maupun rakyat di seluruh Indonesia.

Sebelum lomba panjat bambu betung itu dimulai, panitia lomba membacakan aturan dan tata tertib bagi para peserta. Kelompok yang pertama kali berhasil membawa bendera merah putih yang terpasang pada ujung tiang bambu

betung, maka ia berhak mendapatkan hadiah utama yakni satu unit sepeda motor yang diserahkan langsung oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin. Hadiah kedua berupa satu unit TV Panasonic 32 inch bagi pemenang kedua diberikan oleh Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon, selanjutnya pemenang ketiga mendapatkan satu unit TV Polytron 32 inch yang diserahkan

oleh Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany.

Beberapa hadiah hiburan yang tergantung diatas lingkaran pada setiap tiang bagian atas bambu betung, diantaranya adalah voucher uang tunai senilai 500 ribu rupiah, kipas angin, setrika listrik, wajan dan beberapa baju kemeja pria. Acara tersebut berlangsung meriah dan tampak kepuasan terpancar diwajah para peserta dan masyarakat yang hadir. ■

*(dpp.mp) foto: arif tim par/bh*

## DPR RI Catat Ada Perbaikan Kebijakan Penyelenggaraan Haji

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang didampingi Wakil Ketua Komisi VIII, Abdul Mallik Haramain mengatakan ada beberapa perbaikan kebijakan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1437 H/2016 sebagai upaya perbaikan dan pemberian layanan yang sebaik-baiknya kepada jamaah.

“Beberapa perubahan kebijakan tersebut ada yang bersifat fundamental maupun perubahan yang bersifat peningkatan pelayanan terhadap jamaah

haji baik selama di tanah air maupun di Arab Saudi,"ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

Politisi F-PKS ini menjelaskan

perubahan kebijakan tersebut adalah hasil temuan dari tim pengawasan tahun lalu. Diantaranya terkiat BPIH yang harus dibayar Jemaah Tahun 2016 ditetapkan

dalam mata uang rupiah yaitu sebesar Rp34.641.304,00 (setara USD2.585) nilai ini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya USD2.717.

Kemudian, menggunakan sistem Lindung Nilai (Hedging) yang baru ditetapkan pada tahun 2016. "Dengan system ini makan fluktuasi mata uang sudah diantisipasi sedini mungkin," tuturnya.

Tim pengawas juga telah menganggarkan kembali Upgrade transportasi darat antara kota di Arab Saudi yang dihapus pada tahun 2015. Meningkatkan kembali jumlah manasik haji menjadi 10 kali untuk Provinsi diluar Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Memastikan rasio jumlah Jemaah yang



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Mallik Haramain

dilayani oleh bus Shalawat mencapai 90% sehingga hampir semua pemondokan tersedia bus Shalawat dan juga memastikan peningkatan makanan menjadi 2 kali atau sebanyak 24 kali selama di Makkah

untuk terus mengawasi penyelenggaraan ibadah haji agar para tamu Allah itu dapat lebih baik nyaman, aman, dan terlindungi dalam menjalankan ibadahnya serta menjadi haji mabrur," pungkasnya. ■

dibandingkan tahun 2015.

Fahri juga menyebutkan, penambahan petugas haji dari TNI/Polri untuk meningkatkan perlindungan terhadap Jemaah serta mengubah mekanisme penetapan BPIH dari Perpres menjadi Keppres, sehingga waktu pelunasan Jemaah haji lebih luas.

"Tim pengawas DPR RI berkomitmen

## Pesta Rakyat Untuk Bangun Kerjasama dan Kepedulian

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon menghadiri pembukaan lomba panjat bambu betung yang diselenggarakan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam rangka memeriahkan peringatan 71 tahun Indonesia merdeka dan HUT DPR RI yang ke 71.

“ Kita berharap dengan adanya panjat bambu betung yang diikuti oleh masyarakat, menjadi bagian dari pesta rakyat. Ini tradisi yang bagus, tetapi memang kita tidak memilih pinang, karena pinang merupakan pohon yang sudah semakin langka dan pertumbuhannya memerlukan waktu belasan tahun, sementara bamboo betung dalam waktu tiga sampai lima tahun sudah besar,” ujar Fadli disela-sela acara lomba, Sabtu (20/8).

Ia juga mengatakan, kalau pinang sulit untuk dimanfaatkan kembali, tapi kalau bamboo bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Acara ini bagian dari memeriahkan dan mensyukuri proklamasi kemerdekaan.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Hadiah yang disediakan bagi para peserta datang dari Pimpinan DPR RI, Fraksi-fraksi, dan juga dari kesekjenan.

"Ini menjadi usaha untuk membangun kerjasama dan kepedulian kepada masyarakat. Dan cukup banyak acara

yang diperlombakan, ada lomba mewarnai, panjat bambu betung, sepak bola, pameran Filateli, lukisan, foto, dan ditutup dengan pagelaran wayang golek pada tanggal 3 September," jelasnya.

Menurut Fadli, setiap ada satu peringatan, tentu ada satu harapan untuk pekerjaan yang baru dan yang harus dituntaskan. Harapannya atas pertambahan usia kemerdekaan yang ke 71 tahun ini, bukan hanya sekedar memperingati proklamasi, tetapi lebih memaknai arti kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan itu adalah bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan terutama bebas dari kesulitan-kesulitan hidup.

"Tujuan dari kemerdekaan itu sebenarnya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat, bebas dari rasa takut, dan perdamaian. Merdeka...!," tandas Fadli. ■

## Kenaikan Harga Rokok Diharapkan Kurangi Perilaku Konsumtif

Ketua DPR RI Ade Komarudin berharap usulan pemerintah untuk menaikkan harga rokok hingga dua kali lipat atau menjadi Rp 50 ribu per bungkus dapat mengurangi perilaku konsumtif masyarakat terhadap rokok. Namun, ia juga tak menampik kebijakan tersebut akan mampu mengurangi jumlah perokok aktif secara signifikan.

“ Saya setuju dengan harga rokok dinaikkan. Kenaikkan harga ini sekaligus upaya untuk mengurangi jumlah perokok di masyarakat, walaupun ini masih perkiraan sementara,” ujar Akom, sapaan akrabnya, saat Konferensi Pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/8).

Akom menilai, keputusan Pemerintah yang rencananya akan direalisasikan mulai September, merupakan salah satu langkah untuk menambah pendapatan negara melalui tarif cukai rokok.

"Kalau dinaikkan harganya, otomatis penerimaan negara dari sektor cukai akan meningkat. Itu artinya, menolong APBN kita supaya lebih sehat di masa mendatang," tambahnya.

Politisi dari Fraksi Golkar itu juga



Ketua DPR RI Ade Komarudin

meyakini bahwa kenaikan harga rokok tidak akan berdampak secara signifikan pada industri rokok, termasuk

keberlangsungan petani tembakau.

"Saya meyakini bahwa hal ini tidak akan mengganggu petani tembakau untuk mereka dapat seperti sediakala bekerja di sektornya, sesuai dengan profesi yang dipilihnya selama ini," yakin Akom.

Untuk diketahui, usulan kenaikan harga rokok menjadi Rp 50 ribu per bungkus merupakan hasil studi dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kajian tersebut mengungkapkan kemungkinan perokok aktif akan berhenti

merokok jika harganya dinaikkan setidaknya dua kali lipat dari harga normal. ■

(ann.mp) foto: Anubi/mr.

## Pimpinan DPR RI Lantik Dua Anggota PAW

Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan melantik dua Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).



Pimpinan DPR RI saat melantik dua Anggota PAW dalam Sidang Paripurna.

Kedua Anggota PAW tersebut adalah Sutriyono menggantikan Gamari Sutrisno dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) daerah pemilihan Jawa Tengah III dan Marlinda Irwanti Poernomo sebagai substitusi Budi Supriyanto dari Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Jawa Tengah X.

Pembacaan sumpah janji pelantikan dipandu oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa

saya akan memenuhi kewajiban saya menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat," ujar kedua Anggota Dewan yang dilantik serentak.

Taufik menyampaikan bahwa atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan mengucapkan selamat atas dilantikannya kedua anggota PAW tersebut.

"Atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan menyampaikan selamat atas pelantikan Anggota Dewan tersebut dan berharap untuk segera bergabung dengan para Anggota Dewan lainnya untuk melaksanakan tugas konstitusional," ungkap Taufik. ■

(ann.mp) foto: armanias/ftc.

## Melchias M.Mekeng Gantikan Ahmadi Noor Supit Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Taufik Kurniawan mengukuhkan Melchias Markus Mekeng menjadi Ketua Komisi XI DPR RI, menggantikan Ahmadi Noor Supit. Keduanya merupakan politisi Fraksi Partai Golkar. Pengukuhan berlangsung secara tertutup di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Diitemui usai acara pengukuhan, Taufik mengatakan pergantian Ketua Komisi XI DPR RI merupakan kewenangan Fraksi Golkar. Dan ini merupakan hal yang biasa dilakukan ketika masa persidangan dimulai.

"Ini rutin, biasa-biasa saja. Kewenangan masing-masing Fraksi Golkar mengingat tadi hal yang sangat penting bersamaan dengan proses pembahasan APBN," kata politisi F-PAN itu.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan, hadir dalam pengukuhan ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin (F-PG) dan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (F-PD).

Dalam kesempatan yang sama, Melchias Markus Mekeng menuturkan



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Taufik Kurniawan

pihaknya ingin memperbaiki mekanisme kerja di Komisi XI DPR RI. Termasuk meningkatkan kinerja sehingga lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat.

"Saya sampaikan bahwa saya akan meminta kepada pimpinan DPR RI, pimpinan Badan Anggaran untuk terjun langsung kepada masyarakat. Kita temui masyarakat daerah terpencil yang tertinggal, daerah miskin. Supaya rakyat itu merasakan pertumbuhan ekonomi," jelas Mekeng.

Sebelumnya, Mekeng, politisi asal dapil Nusa Tenggara I, merupakan Anggota Komisi XI DPR RI. Dan Ahmadi Noor Supit, politisi asal dapil Kalimantan Selatan I, sebelum menjadi Ketua Komisi XI DPR RI, sempat menjabat Ketua Badan Anggaran DPR RI. ■

(g) Foto: Arif

## GOPAC akan Gelar Workshop

Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Indonesia akan menggelar Workshop tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi pada 30-31 Agustus 2016 yang dipusatkan di gedung DPR RI. Acara akan dihadiri 150 peserta dari berbagai parlemen dunia.

Demikian disampaikan Ketua GOPAC Indonesia Fadli Zon saat memimpin pertemuan anggota GOPAC Indonesia yang juga para anggota DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/8). Ada semacam *handbook* yang akan dibagikan kepada para anggota GOPAC tentang sistem pemberantasan korupsi dalam *workshop* tersebut. Parlemen, kata Wakil Ketua DPR RI ini, turut aktif membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Seperti diketahui potensi korupsi di lingkungan eksekutif jauh lebih tinggi daripada legislatif. Eksekutif adalah

pengguna anggaran. Jadi, resistensi korupsi mudah sekali dilakukan. Acara *workshop* ini didukung oleh *Westminster Foundation for Democracy*, sebuah LSM di Inggris yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Saat ini, kata Fadli, ada perubahan National Chapter, karena sudah ada 57 anggota baru GOPAC yang terdaftar, baik anggota parlemen aktif maupun mantan anggota parlemen, termasuk para anggota DPD RI.

"Korupsi yang ada sekarang individual. Kita ingin mengurangi. Sebetulnya, tidak hanya di legislatif, di eksekutif justru lebih



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

banyak, karena sebagai pengguna anggaran. DPR RI itu bukan pengguna anggaran. Hampir di semua lini ada kasus korupsi. Dan masing-masing lini berusaha untuk mencegah dan memberantas korupsi," ujar Fadli.

*Workshop* ini dihadiri pula delegasi UNDP dan *Islamic Development Bank*. Untuk *workshop* selanjutnya akan diadakan di Yordania pada akhir tahun ini. ■

(mb) foto: arif/riw

## DPR RI Tunda Persetujuan Perppu No.1/2016

Sidang Paripurna DPR RI yang beragenda pengambilan keputusan atas Perppu No 1/2016 tentang perubahan UU No 23/2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang diwarnai perbedaan pendapat. Setelah melakukan lobby antara Pimpinan DPR RI dengan Fraksi-Fraksi terhadap agenda ini, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan Perppu No 1/2016.

“ Pada prinsipnya saling menghargai terhadap pandangan-pandangan fraksi yang ada, aspek kehati-hatian menjadi pertimbangan dari seluruh fraksi sehingga dari masukan seluruh fraksi dan Pimpinan DPR RI, ada kesamaan pandangan dari agenda ini untuk ditunda dalam pengambilan keputusan,” kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, saat memimpin Rapat Paripurna, Selasa (23/8).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, mengatakan kalau Perppu ini disetujui menjadi UU maka akan ada pertemuan khusus antar Kementerian untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

tentang mekanisme pelaksanaannya. Seperti PP rehabilitasi sosial, PP pemasangan chip, dan PP kebiri.

"Karena itu kami mendesak kepada DPR RI untuk secepatnya disahkan,

namun kenyataannya masih ditunda, maka kami bersabar, kami minta secepatnya untuk mengesahkan Perppu itu," katanya.

Menurutnya, jika DPR RI yang mewakili rakyat merasa urgent terhadap perlindungan anak, maka dia mohon dipercepat, supaya bisa mengambil tindakan-tindakan, dan bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat.

"Karena ini adalah tuntutan masyarakat, dan tuntutan anak-anak Indonesia melalui Hari

Anak Nasional yang menginginkan agar kita akhiri kekerasan seksual terhadap anak dan menghukum seberat-beratnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak," tegas Menteri Yohana. ■

## Komisi I Siap Uji Kelayakan Calon Kepala BIN

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, terkait penggantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), prosesnya diawali dengan pembacaan surat masuk yang dibacakan dalam Rapat Paripurna. Begitu surat masuk dibacakan, maka atas penugasan DPR RI, Komisi I yang berpasangan kerja dengan BIN siap untuk memprosesnya.

“ Intinya, Komisi I siap mengadakan uji kelayakan dan memberikan pertimbangan bukan persetujuan. Sesuai ketentuan perundang-undangan, pertimbangan DPR RI itu selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Ketua DPR RI,” katanya menjawab pers sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/8).

Hal itu dikemukakannya menanggapi akan dilantiknya Komjen Budi Gunawan menjadi Kepala BIN

menggantikan Sutiyoso.

Terkait munculnya Komjen Budi Gunawan yang disebut-sebut akan menggantikan Sutiyoso, Pimpinan Komisi I DPR RI ini menyatakan sejauh ini belum mendengar. "Namun siapapun yang diajukan, Komisi I akan lakukan uji kepatutan dan kelayakan dan memberikan pertimbangan," jelasnya.

Terhadap sosok BG tersebut, TB Hasanuddin

mengatakan, sebagai Wakapolri maka masalah intelegen dan penyelesaiannya cukup memahami. Soal waktu apakah tepat atau tidak dilakukan penggantian saat ini, itu menjadi wewenang hak prerogatif Presiden.

"Intinya DPR RI hanya diminta memberikan pertimbangan," ia menegaskan. ■



Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin

## Naikkan Harga Rokok, Kebijakan Serampangan dan Tak Bijak

Pemerintah dinilai tidak bijak, serampangan, bahkan latah dengan menghembuskan wacana menaikkan harga rokok Rp 50 ribu per bungkus. Ini bentuk frustrasi pemerintah dalam mengejar pendapatan untuk APBN yang kini mengalami kebuntuan.

Ini adalah penegasan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat ditemui sebelum Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/8). Wacana ini menciptakan kegaduhan baru. Diawali dari hasil penelitian Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK), Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, yang kemudian menjadi viral di medsos. Hasil penelitian ini kemudian diambil sebagai dasar kebijakan.

"Kebijakan menaikkan harga rokok menjadi Rp 50 ribu (naik lebih dari dua kali lipat) yang didasarkan pada satu hasil penelitian yang bisa dengan mudah diplintir adalah sebuah proses pengambilan kebijakan yang tidak bijaksana. Lebih-lebih, kebijakan itu disusun atas dasar viral yang terkesan nyeleneh di Medsos. Mestinya, proses pengambilan suatu kebijakan itu harus memperhatikan banyak faktor, terutama sekali

dampak sosial-ekonomi masyarakat," kata Heri.

Kebijakan ini bisa jadi blunder bagi Presiden Joko Widodo. Hasil penelitian tersebut perlu pendalaman kembali dengan semua pemangku kepentingan. Menurut politisi Partai Gerindra itu, kebijakan menaikkan harga rokok dicurigai sarat kepentingan. Bila kenaikan harga rokok benar-benar diterapkan, dampaknya sangat luas dan sistemik. Mulai dari rusaknya struktur industri rokok, terancamnya petani tembakau, hingga ledakan pengangguran yang berujung pada munculnya kelompok miskin baru.

Heri menolak keras rencana kenaikan ini. Katanya, kelak akan banyak pabrik rokok tutup, terutama rokok kretek yang sebetulnya sudah sangat tertekan oleh serbuan rokok luar. "Pengangguran dan kelompok miskin baru akan muncul. Tahun 2014 saja, industri rokok melibatkan 5,98 juta pekerja yang terdiri dari 4,28 juta pekerja di sektor manufaktur plus 1,7 juta pekerja di sektor perkebunan. Jumlah pabrik rokok yang semula 4.669 telah berkurang menjadi 700 pada 2015 akibat kebijakan beberapa tahun belakangan ini," ungkapnya lebih lanjut.

Terganggunya struktur industri rokok, sambung Heri lagi, sudah pasti akan berdampak pada penerimaan cukai dalam APBN. Tahun 2015 saja, tercatat penerimaan cukai sebesar Rp144,6 triliun (96,4% adalah sumbangan dari cukai rokok). Ini jauh lebih tinggi dari kontribusi deviden BUMN yang hanya mencapai Rp37 triliun.

"Tanpa dinaikkan saja, penerimaan cukai rokok sudah mulai menurun akibat berbagai kebijakan yang ada, termasuk peredaran rokok ilegal yang sudah mencapai 11,7% yang sudah merugikan negara sekitar Rp9 triliun. Akibatnya, penerimaan cukai di kuartal I-2016 turun 67% dari kuartal I-2015 atau menjadi hanya Rp7,9 triliun dari yang tadinya sebesar Rp24,1 triliun"

Ditambahkan Heri, kenaikan harga rokok tidak otomatis membuat perokok berhenti merokok. Yang paling mungkin para perokok itu akan beralih ke rokok ilegal. Dan peredaran rokok ilegal naik drastis. Ini jadi masalah baru lainnya. Untuk itu, pemerintah perlu mengkaji secara komprehensif kebijakan tersebut. Plus-minusnya harus dilihat secara hati-hati dan mendalam. Jika tujuannya menaikkan penerimaan cukai 2017 yang ditargetkan sebesar Rp157,16 triliun, harusnya tidak jadi boomerang. Seperti diketahui cukai hasil tembakau ditargetkan sebesar Rp149,88.

"Pemerintah ditugasi untuk memberi kenyamanan, kedamaian, dan kepastian kepada masyarakat. Bukannya justru menambah kebingungan rakyat dengan urusan yang tidak perlu. Rakyat sedang menunggu kerja nyata untuk menanggulangi kemiskinan yang sudah mencapai 28 juta orang. Rakyat sedang menunggu aksi nyata untuk penciptaan kesempatan kerja yang lebih besar. Rakyat juga sedang menunggu gebrakan nyata untuk meyakinkan bahwa pemerintah ini sungguh-sungguh dan mampu," tutup Heri. ■



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

(mb) foto: arif/mr.

## PKPU Tak Boleh Lahirkan Primordialisme

Anggota Komisi II DPR RI Tagore Abubakar menyayangkan isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 6 Tahun 2016 tentang Pilkada di daerah otonomi khusus yang cenderung mengarah pada semangat primordialisme. Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPU pada Kamis sore, (18/8) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

**P**KPU dimaksud yakni dalam pasal 12 yang menyebut jika calon kepala daerah di Provinsi Aceh harus memenuhi syarat sebagai orang asli Aceh. Ia pun mementang pasal



Anggota Komisi II DPR RI Tagore Abubakar

dalam PKPU tersebut karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa syaratnya adalah WNI.

"KPU tidak cermat dalam menganalisa itu. Dalam Undang-Undang Aceh juga menyatakan syaratnya adalah WNI," ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun mengatakan PKPU tersebut harus diperbaiki agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia pun menyayangkan keteledoran KPU dalam menyusun PKPU. Sebab, pasal ini jika dibiarkan akan mendorong semangat primordialisme, bukan nasionalisme.

Menanggapi itu, Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, pihaknya akan mempelajari kritik yang disampaikan oleh legislator dari Dapil Nanggroe Aceh

Darussalam II tersebut. Namun, ia mengetahui jika aturan tersebut tidak ada dalam undang-undang khusus tetapi ada dalam Qanun yang merupakan aturan turunan dari UU Aceh. "Terkait orang asli Aceh, itu tidak ada di UU khusus, tapi ada di Qanun," ungkap Juri.

Menurut Juri, ia akan memperhatikan apakah keharusan orang asli Aceh sebagai syarat untuk calon kepala daerah akan dipertahankan atau dihapus. Dirinya juga menjelaskan saat pembahasan soal syarat itu, KPU hanya menyerap aspirasi dari DPR RI Aceh dan Pemerintah Provinsi Aceh.

"Ada aspirasi di dalam proses penyusunan peraturan, karena itu juga hukum positif. Qanun memang berada di bawah UU, kami tentu akan mengkaji ulang kalau itu ternyata bertentangan dengan UU," ujar Juri menjawab pernyataan Tagore. ■

(b.m.p./fatazka/ra)

## Amri Tuasikal Minta Langkah Preventif Perlindungan Anak

Sidang Paripurna yang beragendakan membahas Perppu No 1/2016 tentang Perlindungan Anak, atau Perppu Kebiri Selasa (23/8) akhirnya ditunda karena belum ada kesepakatan fraksi-fraksi. Perppu yang dikeluarkan Presiden Jokowi itu karena maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak. Kasus ini juga dianggap bisa merusak generasi bangsa dan berdampak panjang bagi korban.

“Menanggapi hal itu, anggota Komisi VIII DPR RI Amrullah Amri Tuasikal lebih sepatat jika pemerintah menempuh langkah preventif. Karena kebiri tak memberikan efek jera.

"Kita semua bersepakat bahwa kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap anak adalah perbuatan keji tak beradab yang menghancurkan masa depannya. Horor yang dialami akan selamanya membayangi kehidupan si anak," jelas Amrullah di sela-sela Rapat Paripurna.

"Oleh karenanya langkah preventif yang menyeluruh harus dilakukan oleh

pemerintah guna menekan kasus semacam ini terjadi. Namun sekali lagi, negara kita adalah bangsa yang berlandaskan hukum yang bercita-cita agar menjaga bangsa ini tetap beradab, memanusiatekan manusia," sambungnya.

Menurutnya, hukum kebiri, selain tak memberi efek jera juga tidak memberikan pemenuhan hak-hak dasar bagi manusia dan merendahkan martabat manusia seutuhnya.

"Apapun produk hukum yang dibuat di negeri ini harus dan tanpa kecuali mengedepankan pemenuhan hak-hak dasar manusia, bukan justru merendahkan



Anggota Komisi VIII DPR RI Amrullah Amri Tuasikal

martabatnya. Pelaksanaan hukuman kebiri sebagaimana diatur oleh Perppu itu, menurut hemat saya adalah tindakan yang merendahkan martabat manusia dan belum terbukti menimbulkan efek jera bagi para pelaku," paparnya.

Politisi Gerindra ini meragukan gairah seksual bagi pelaku yang mendapatkan hukuman kebiri bisa berkurang. Selain itu, dengan regulasi ini tak menjamin pelaku tak mengulanginya di kemudian hari.

"Mungkin mereka akan kehilangan

gairah seksualnya, namun keinginan atau drive untuk mengulanginya akan tetap ada terlepas fungsi seksualnya masih mampu atau tidak," ujarnya.

Alasan itu sehingga dirinya tak sepakat regulasi itu diberlakukan. Menurutnya, Perppu itu, selain langkah mundur bagi penegakan hukum di Indonesia, juga karena aturan itu sudah diratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada 2005 lalu.

"Selain itu, Perppu ini adalah langkah mundur bagi penegakan hukum di

Indonesia yang merupakan negara atau pihak yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada 2005 dan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia pada 1998. Oleh karenanya, mari kita berhati-hati dalam menyikapi Perppu ini," pintanya. ■

(ae) Foto: Kresno/hr

## Asumsi Makro Harus Cerminkan Kondisi Riil Masyarakat

Seluruh fraksi di DPR RI menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dibahas lebih lanjut di tingkat teknis. Kesepakatan tersebut dicapai setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terkait RAPBN dan Nota Keuangan dalam rapat paripurna.

“Pandangan fraksi adalah menerima dan tidak ada yang menolak. Hanya saja, ada sejumlah aspek dan substansi yang harus dicermati oleh pemerintah,” kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Menurutnya, dari pandangan fraksi tersebut terungkap bahwa pemerintah jangan hanya berkuat pada asumsi makro semata. Sebab, bagaimana asumsi makro tersebut bisa mencerminkan hal-hal riil di masyarakat sehingga bisa terbawa dalam satu tarikan nafas.

"Misalnya masalah gini ratio, masalah pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Hal-hal semacam itu menjadi poin-poin penting yang disampaikan oleh sejumlah fraksi. Nantinya, hal-hal tersebut akan ditindaklanjuti di Badan Anggaran untuk menentukan besaran terkait asumsi makro," ujarnya.

Selanjutnya, besaran tersebut akan menjadi keputusan bersama antara DPR RI dengan pemerintah dalam bentuk UU APBN 2017. Taufik memastikan, tanggapan pemerintah akan disampaikan dalam Rapat Paripurna pada 30 Agustus mendatang.

"Secara prinsip, DPR RI mengapresiasi kerja keras dari semua pihak, terkait penetapan asumsi-asumsi



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

makro. Namun sekali lagi, asumsi makro tidak hanya berkuat pada angka-angka saja, melainkan bisa mencerminkan kondisi riil yang dirasakan oleh masyarakat," tandasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan, kritisi dari sejumlah fraksi kepada pemerintah terkait RAPBN merupakan hal yang biasa. Sebab pada intinya, seluruh fraksi tidak ingin semua pihak hanya berkuat pada asumsi makro

semata.

"Jadi jangan hanya berkuat pada prestasi untuk menurunkan laju inflasi dengan menambah masuknya barang impor ke pasar. Sebab, masuknya barang impor harus ada yang terserap oleh kemampuan dan daya beli masyarakat," tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebab, rendahnya inflasi dan bagusnya makro ekonomi tidak akan ada artinya bila daya beli masyarakat rendah. Apalagi bila ada kesenjangan yang tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan belum tersentuh oleh pemerintah.

"Untuk itulah, DPR RI dan pemerintah sepakat untuk mempercepat pembahasannya. Sehingga, hal-hal yang terkait dengan asumsi makro bisa mencerminkan kondisi riil masyarakat," tukasnya.

Sebelumnya, sepuluh fraksi DPR RI menyampaikan pandangan fraksi terhadap RAPBN 2016. Walaupun seluruhnya menyetujui untuk melanjutkan proses pembahasan APBN, namun ada sejumlah catatan dan pandangan fraksi yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. ■

(gf) Foto: arrief, itm/parle/hr

## Pembukaan Seminar RUU KUHP

Hukum harus sesuai dengan perkembangan zaman, karena masyarakat sangat dinamis. Oleh karena itu hukum harus mengikutinya. Sementara hukum yang ada di Indonesia, KUHP (kitab undang - undang hukum pidana) merupakan warisan Belanda. Tentu kondisi bangsa Indonesia tidak sama dengan Belanda. Oleh karena itu diperlukan sebuah perubahan.

“Hal itu diungkapkan Ketua DPR RI, Ade Komarudin dalam sambutan pembukaan Seminar Rancangan Undang-undang tentang KUHP bertema "Evaluasi dan Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, di Gedung Nusantara V, Senayan Jakarta, Selasa (24/8).

"RUU KUHP dibentuk untuk memperbaiki yang sudah ada. Tujuan utamanya menjamin rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia dengan prinsip dasar rasa saling menghargai dan menghormati," ungkap Akom, begitu ia biasa disapa.

Akom berharap Komisi III bersama dengan pemerintah dapat segera menyelesaikan RUU yang saat ini memasuki pembahasan buku ke dua. Namun tetap dengan kualitas yang baik. Dengan kata lain jangan sampai hanya karena dikejar target waktu, namun mengesampingkan kualitas dari isi RUU itu sendiri.

Dalam sesi pertama yang mengambil topik politik kebijakan terhadap kejahatan/hukum pidana meteriil dan upaya rekodifikasi hukum pidana itu dimoderatori oleh Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harman.

Pada kesempatan itu hadir sebagai pembicara tamu Pinar Fatma Olcer (Associate Professor dari Leiden University). Sementara dari dalam negeri hadir Muhammad Mustofa, Profesor yang menjadi guru besar kriminologi di Universitas Indonesia.

Dalam makalahnya Mustofa mengatakan bahwa hukum mencerminkan moralitas masyarakat, sehingga



Ketua DPR RI Ade Komarudin beserta Pimpinan Komisi III saat membuka seminar RUU KUHP.

mencerminkan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sementara UU KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan warisan Belanda sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan moralitas bangsa Indonesia.

"Masyarakat Belanda bisa dikatakan homogen, dan lebih bersifat individualistis, sementara masyarakat Indonesia yang berbhineka tunggal ika dengan segala perbedaannya itu tetap guyub, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan kelompoknya," ujar Mustofa.

Ditambahkannya keanekaragaman suku dan adat istiadat di Indonesia menghasilkan hukum yang berbeda-beda untuk daerahnya. Dan

dulu semua hukum adat tidak berlaku, yang ada hanya hukum yang berlaku di Indonesia. Sejatinya hal itu juga harus ditampung kedalam hukum Indonesia yakni KUHP, karena itulah cermin dari masyarakat Indonesia yang heterogen.

Selain Mustofa, hadir pula pembicara lainnya seperti Johannes Usfunan yang menilai harus adanya perbedaan antara hukum dalam tindak pidana khusus (Lex specialis) dan tindak pidana umum (lex generalis). Tindak pidana khusus yang berkaitan dengan tugas negara, seperti

komunisme. Sedangkan tindak pidana umum merupakan kejahatan-kejahatan umum lainnya. Sedangkan Edy Yunara lebih memberikan masukan terkait pasal-pasal yang telah disusun dalam RUU KUHP. ■

(Ayah), foto: andri/bir

## Imam Suroso Dorong Hak Paten Kelapa Kopyor

Anggota DPR RI Imam Suroso mendorong pemberian hak paten untuk kelapa kopyor yang merupakan hasil perkebunan asli kabupaten Pati, Jawa Tengah. Menurutnya hal ini perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak didahului oleh negara lain, karena berhembus kabar akan di klaim oleh negara Philipina.

“Jika ada usaha untuk mengklaim hasil perkebunan asli kita, maka langkah dan usaha kita adalah dengan segera mempatenkannya. Sebab kalau aset ini dibiarkan maka akan diambil dan diklaim menjadi hak paten negara lain, padahal ini adalah peninggalan leluhur kita yang luar biasa untuk bisa kita kembangkan,” ujarnya saat berkunjung ke sentra perkebunan kelapa kopyor di daerah Tayu,

## Daerah Bisa Usulkan Anggaran Untuk Pembuatan E-KTP

Komisi II DPR RI mengusulkan agar ke depan apabila pemerintah tidak bisa membiayai pembuatan e-KTP dengan APBN yang memang sangat terbatas, maka daerah bisa mengusulkan melalui APBD. Dalam penyusunan APBD tahun ini, beberapa daerah sudah mulai menganggarkan untuk keperluan terkait e-KTP.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Achmad Reza Patria kepada pers sebelum Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/8). Menurut Pimpinan Komisi dari Fraksi



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Achmad Reza Patria

Gerindra ini, seharusnya pembuatan e-KTP sudah selesai pada 2014 yang lalu. Dan sekarang terkait dengan pembahasan UU Pemilu bahwa e-KTP harus selesai 2019 pada saat Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden. Pemerintah memberi batasan tanggal 30 September tahun ini semua masyarakat melakukan rekam di kecamatan atau dukcapil di setiap Kabupaten.

Ia tak menampik ada beberapa masalah seperti kekurangan blanko bulan ini sudah diatasi oleh pemerintah pusat. Kemudian juga kekurangan perangkat keras seperti kertas printer tinta dan monitor. "Kami berharap 22 juta masyarakat yang belum memiliki KTP bisa merekam dalam 1-2 bulan ke depan," harapnya.

Reza Patria mengaku sudah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri, bahwa tanggal 30 September adalah batas untuk memacu masyarakat untuk mendaftar. Meski demikian, tidak ada hak-hak yang hilang dari warga negara apabila sampai tanggal 30 belum mendaftar.

Akhirnya dia mengharapkan dengan batas waktu tanggal 30 September tersebut dapat mendorong seluruh masyarakat yang belum merekam data di Kabupaten atau Kecamatan dapat segera merekam. "Harapan kami memang dalam waktu yang tidak terlalu lama, seluruh 22 juta warga bisa segera merekam, kecuali beberapa masyarakat yang di luar negeri seperti TKI, yang sakit dan halangan lainnya," ia menambahkan. ■

(mp)/foto: rivan armanias/ku.

Kabupaten Pati, Jawa Tengah baru-baru ini.

Ia akan membawa hasil kunjungannya tersebut ke rapat terbatas di DPR RI, agar ada anggaran tersendiri untuk pengembangan kelapa kopyor. Imam Suroso juga akan membantu mencari investor, bahkan dirinya juga siap berinvestasi demi pengembangan kelapa kopyor tersebut.

Kelapa kopyor di Indonesia memang telah dihasilkan di beberapa daerah, tetapi untuk jenis kelapa kopyor yang paling terkenal akan kualitasnya dan telah melalui tahap penelitian BALITBANG Kementan adalah jenis Kelapa Kopyor Genjah dari kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jenis kelapa kopyor genjah Pati memiliki ciri fisik yang lebih kecil dari tipe kelapa dalam. Tetapi untuk rasa kelapa kopyornya jauh lebih enak daripada kelapa kopyor yang

dihasilkan dari tipe kelapa dalam.

Kelapa kopyor genjah Pati dikembangkan oleh warga sekitar dengan cara sistem generatif (indukan) yang memiliki kualitas unggulan. Dan hasil pengembangan tersebut dalam bentuk bibit dan yang sudah ditanam menunjukkan keberhasilannya dengan menghasilkan kualitas bibit keturunan yang baik.

Tayu adalah sebuah daerah kecamatan di kabupaten Pati yang menjadi sentra pengembangan kelapa kopyor genjah Pati. Dari tahun ke tahun, permintaan buah dan bibit kelapa kopyor dari luar daerah semakin meningkat. Harga jual dari buah dan bibit kelapa kopyor juga sangat tinggi. ■

(dep.mpr), foto: jayadi/hr.



Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso

## Panja SDGs BKSAP Apresiasi Kabupaten Bojonegoro

Panitia Kerja (Panja) Sustainable Development Goals (SDGs) Badan Kerja Sama antar Parlemen (BKSAP) menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Bojonegoro, karena mempunyai dua program SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang sangat baik, yaitu desa sehat dan desa cerdas.

Demikian dikatakan Ketua Panja SDGs Nurhayati Ali Assegaf saat memimpin kunjungan kerja (kunker) Panja SDGs BKSAP ke Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Selasa (23/8).

Nurhayati menjelaskan, kunker Panja SDGs BKSAP ini bertujuan diantaranya melihat langsung agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah dengan melihat konteks situasi dan potensi daerah, sosialisasi dan diseminasi agenda pembangunan berkelanjutan, agar TPB lebih 'akrab' di dalam kesehatan masyarakat Indonesia. Selain itu, untuk menarik aspirasi dan persepsi masyarakat Bojonegoro dalam menentukan prioritas-prioritas yang ada di agenda pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bojonegoro.

Seperti diketahui, SDGs untuk periode 2015-2030 ini sudah disepakati oleh ratusan kepala negara dan kepala pemerintah saat menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Pada sidang itu, Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Di Indonesia, langkah tersebut ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan membentuk Panja SDGs, yang selanjutnya akan mengeksaminasi lebih dalam proses-proses yang dibutuhkan



Ketua Panja SDGs Nurhayati Ali Assegaf

untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," jelas Nurhayati.

Lebih lanjut politisi F-PD itu mengatakan bahwa PBB telah menjelaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) terhadap pembangunan berkelanjutan sehingga pentingnya keterlibatan DPR RI dalam mensosialisasikan program SDGs.

"Dari 17 tujuan SDGs, ada beberapa yang di fokuskan antara lain mencerdaskan bangsa, kesejahteraan rakyat, tidak ada lagi kemiskinan dan kelaparan, kesehatan masyarakat, kesetaraan perempuan, peran

kita di dunia global," jelas politisi dari dapil Jawa Timur itu.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Bojonegoro Suyoto menyampaikan di hadapan seluruh Tim Panja SDGs BKSAP, Kabupaten Bojonegoro sejak tanggal 22 Maret lalu, telah mencanangkan SDGs sebagai komitmen. Komitmen itu meliputi kehidupan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, tanpa ketidakadilan dan tanpa kesenjangan dalam pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan adanya keseimbangan di lingkungan sosial dan alam.

Tahun 2015, kami menegaskan bahwa belanja APBD tahun 2016 dan selanjutnya hanya fokus ketiga hal yang relevan dengan SDGs yaitu pembangunan SDM, penguatan infrastruktur yang sangat signifikan pada ekonomi, dan penyiapan fiskal," jelas Suyoto.

Suyoto menambahkan, Kabupaten Bojonegoro sudah secara resmi menyatakan diri sebagai satu-satunya daerah yang siap dalam pelaksanaan SDGs dan juga sudah membuat beberapa komitmen untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

Kunjungan kerja Panja SDGs BKSAP di ikuti oleh sejumlah Anggota BKSAP, Wakil Ketua Panja Rofi Munawar (F-PKS), Syaifulloh Tamliha (F-PPP), Venna Melinda (F-Demokrat), Tjatur Sapto Edy (F-PAN), Amelia Anggraini (F-Nasdem) dan Zaenudin Amali (F-PG). ■

(ri:nu) foto: rami/hr



Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

## DPR RI Sesalkan Penertiban Komunitas Perpustakaan di Bandung

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana menyesalkan penertiban Komunitas Perpustakaan Jalanan oleh Kodam III Siliwangi di Taman Cikapayang Dago, Kota Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini. Diduga, penertiban ini disertai dengan aksi pemukulan. Menurutnya, penertiban ini tidak dapat dibenarkan.

“Kegiatan kreatif komunitas yg mengarah pada pencerdasan termasuk peningkatan minat baca kan seharusnya perlu didukung,” kata Dadang, dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, Selasa (23/8).

Menurut politisi F-Hanura itu, kegiatan Komunitas Perpustakaan Jalanan yang menggelar lapak perpustakaan itu cukup positif. Dengan itu membuat persepsi masyarakat menjadi positif dan membuktikan kaum muda juga menggemari buku.

"Jadi kalau pun ada kecurigaan dengan geng motor yang di khawatirkan memanfaatkan aktivitas perpustakaan jalanan, ya jangan kemudian dilakukan pengusuran apalagi dengan pemukulan," kecewa Dadang.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu berharap kasus penganiyaan yang disinyalir terjadi itu, dapat diusut hingga tuntas. Ia pun berharap, kejadian seperti ini tak terulang kembali.

Mengutip dari berbagai media online nasional, diketahui bahwa Komunitas Perpustakaan Jalanan ini kerap menggelar lapak baca setiap Sabtu malam di Taman Cikapayang mulai pukul 19.00 WIB hingga 24.00 WIB. Salah satu pengurus komunitas ini mengaku saat aktivitas serupa sering diusir personel TNI, namun sebelumnya tidak pernah menggunakan kekerasan fisik.

Salah satu pengurus mengaku, saat malam kejadian, tiba-tiba datang dua truk TNI, satu mobil polisi militer, mobil preman, dan sepeda motor. Setidaknya ada 50 personil membawa senjata api dan pentungan rotan.

Kala itu, di sebelah lapak Perpustakaan Jalanan hadir klub motor yang tengah nongkrong. Mereka langsung bubar dengan motornya, namun anggota Perpustakaan Jalanan yang saat itu berjumlah lima orang tidak bisa langsung membubarkan diri, mereka membereskan buku, poster dan spanduk yang mereka bawa terlebih dahulu.

"Kalau klub motor kan tinggal pergi, kita mah ada yang harus diberesin dulu. Terus ada yang bilang 'Udah yang lagi jualan diam aja'. Disangkanya kita jualan, ya disuruh diam, kita diam. Tiba-tiba ada seorang pakai baju preman mukul teman saya pakai HT (handy talky-red). Mukul sambil bentak-bentak 'bubar-bubar'," tutur salah satu pengurus yang namanya tak mau disebut itu.

Menanggapi tuduhan pemukulan itu, kata Kapendam III Siliwangi Letkol Desi Ariyanto mengaku pihaknya memberikan kesempatan kepada mereka melapor ke Denpom bila saat kegiatan patroli itu ada oknum prajurit memukul guna tindak lanjut sesuai aturan berlaku.

"Tidak ada prajurit TNI dalam hal ini Kodam III Siliwangi yang melakukan tindak pemukulan. Beberapa anak muda yang berkumpul malah membentak-bentak petugas yang sedang melaksanakan penertiban," kata Ariyanto. ■

(19) Foto: Azka/mr.

## Artis Atau Budayawan Miliki Hak Sama Jadi Anggota DPR RI

Membicarakan kualitas kinerja anggota DPR RI mestinya memakai standar yang sama tanpa melihat latar belakang profesi. Selain itu perlu ditentukan indikatornya anggota Dewan berkualitas seperti apa dan tidak berkualitas itu seperti apa.

“Jangan mendiskreditkan profesi tertentu saja seperti artis atau budayawan yang katanya hanya mengandalkan popularitas tapi tidak menunjukkan kinerjanya. Artis atau budayawan memiliki hak yang sama untuk menjadi anggota DPR RI,” tandas anggota DPR RI dari Fraksi PAN Desy Ratnasari menjawab pertanyaan pers Selasa (23/8) di depan Ruang Paripurna, Senayan, Jakarta.

Menurut anggota Komisi VIII ini, artis atau profesi lain mempunyai hak yang sama maju menjadi wakil rakyat dan saat menjadi wakil rakyat harus menunjukkan potensi terbaik dalam menunaikan tugasnya. Terkait seperti apa



Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari

persyaratan, ia meminta jangan hanya pada hal-hal yang sifatnya administratif saja yang kemudian bisa diotak-atik oleh panitia pendaftaran.

Yang terpenting, lanjut Desy, semua caleg siap dan mampu menjalankan amanah dan itu yang utama dan kembali kepada

kriteria masing-masing orang. "Kalau mau diperketat monggo saja mau setahun terlibat dalam parpol silahkan. Mau 1-2 atau 3 tahun berkecimpung dalam parpol, namun tidak bisa menjadi indikator keberhasilan

atau kualitas anggota Dewan," ujarnya.

Menurut Desy, kalau mau bicara kualitas sekalian saja pendidikannya, misalnya caleg harus S2 jangan hanya keterlibatan dalam parpol. Sebab setelah terpilih lewat pemilu, para anggota Dewan menjalani pendidikan di Lemhanas dan juga mengikuti TOT MPR.

Menjawab pertanyaan mengenai masih adanya anggota Dewan yang menjalani profesi artis, Desy berkilah bahwa menjadi artis akan mudah sekali dilihat. Yang berseliweran bukan artis banyak, tetapi tidak kelihatan karena bukan artis yang di depan layar. "Jadi kalau mau bicara kualitas anggota DPR RI mari sama-sama duduk dirumuskan dalam UU atau tatib secara teknis memang menjadi kriteria sehingga mudah untuk melihat kinerjanya sesuai standar," tambahnya.

"Sedangkan kalau mau bicara institusi DPR RI, maka Pimpinan Dewan dan fraksi-fraksi yang berhak menentukan apa yang menjadi standar keberhasilan dan kualitas masing-masing anggota Dewan," jelas pelantun Tenda Biru menambahkan. ■

(mp:rie/), foto: arief/br.

## DPR RI Gelar Lomba Panjat Bambu Betung

Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany memberikan sambutan pada acara lomba panjat bambu betung, yang merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pesta rakyat yang diselenggarakan DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (20/8).

“ DPR RI menyelenggarakan pesta rakyat yang berisi beberapa kegiatan yang merupakan rangkaian dari peringatan dan perayaan HUT RI dan sekaligus HUT DPR RI. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut antara lain adalah panjat bambu betung yang diikuti oleh 284 orang, dan ada 71 buah tiang bambu betung, dimana pada setiap tiang tersebut diikuti oleh peserta yang terdiri dari 4 orang,” ucap wanita yang biasa disapa Win tersebut di dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan, bahwa pada hari yang sama juga diselenggarakan lomba mewarnai gambar gedung DPR RI dan diikuti oleh 500 anak-anak. Selain itu ada juga lomba tenis lapangan, acara pertemuan dengan netizen, pertemuan dengan Pemred, pameran foto, lukisan, dan pameran



*Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany*

perangko yang sudah dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

" DPR RI juga mengadakan kegiatan donor darah, serta pidato dalam rangka laporan kinerja DPR RI kepada masyarakat yang diikuti dengan acara tumpengan. Sebagai kegiatan penutup

dari seluruh rangkaian acara ini adalah penyelenggaraan wayang golek yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 September," paparnya.

Win juga menjelaskan bahwa seluruh hadiah yang disediakan bagi para pemenang dan peserta lomba berasal dari partisipasi Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi-Fraksi, Pejabat Setjen DPR RI dan BKD, KORPRI, Koperasi Pegawai serta Darma Wanita.

"Pada acara ini disediakan makan gratis sejumlah 4.200 porsi untuk seluruh masyarakat yang hadir, dan juga ada hiburan musik. Semoga seluruh rangkaian acara ini dapat berlangsung dengan meriah," harap Win. ■

*(dep)\_foto: rmi\_tin.parte/bn*

## Endang Srikarti Gelar Syukuran Peringati HUT RI ke-71 di Dapil

Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani menggelar acara malam tasyakuran peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 71, di Desa Madumulyo, Pulisen, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (17/8).

“ Hari ini kita merayakan hari kemedekaan Republik Indonesia yang ke 71 tahun, saya bersama masyarakat Boyolali dan sekitarnya, merasa sangat berbahagia, karena acara ini memang yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” ujar Endang.

Selain tumpengan, dia juga berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Berbagai hadiah bagi pemenang lomba disiapkan, untuk grup atau kelompok diberikan hadiah sembako, sementara



*Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani*

juara perorangan diberikan hadiah senilai dua ratus ribu rupiah dalam bentuk sembako dan penggorengan.

"Untuk anak-anak sekolah, sarana dan prasarananya juga kita berikan. Jadi mereka bisa merasakan kebahagiaan setiap setahun sekali. Ada kenang-kenangan khusus untuk tidak bisa dilupakan bagi mereka dalam memperingati hari

## Setjen DPR RI Berikan Pembekalan Kepada Calon Jema'ah Haji

Sekretariat Jendral DPR RI melakukan pelepasan serta memberikan pembekalan kepada calon Jema'ah Haji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen di Ruang Rapat Sekjen, Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/8).

**S**etyanta Nugraha selaku Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jendral DPR RI mengatakan pagi hari ini kita melaksanakan pembekalan kepada teman-teman yang akan menunaikan Ibadah Haji. Hadir pula dalam kegiatan Ust. M. Yahya Irawan yang memberikan tausiahnya.

"Alhamdulillah sudah diberikan pembekalan, pertama tadi Bu Sekjen yang menyampaikan pengalaman beliau ketika menunaikan ibadah haji. Kemudian Ust. Yahya menyampaikan bagaimana harus berperilaku dan juga menjaga kesehatan karena Ibadah haji adalah ibadah fisik, makanya yang pertama harus dijaga adalah fisik yaitu kesehatan dan yang kedua menjaga lisan itu yang penting," ujar Toto sapaan akrab Irtama usai memberi pembekalan.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kegiatan ini penting karena dari pembinaan rohani ini nantinya akan berpengaruh kepada perilaku dan meningkatkan jiwa religius apalagi diketahui saat ini Sekjen dan BKD memiliki tata nilai yang disebut RAPI (Religius, Akuntabel, Profesional dan Inovatif).

"Di RAPI itu kan yang utama dari tata nilai ini adalah religius, oleh karena itu beberapa waktu lalu ada himbauan ketika kita mendengar suara adzan semua kegiatan yang sedang berlangsung dimohonkan untuk berhenti sejenak guna melaksanakan sholat," tutur Toto.

Dirinya pun mengapresiasi kegiatan pembekalan yang rutin dilakukan oleh Dewan Pengurus KORPRI Setjen DPR RI. "Saya apresiasi kepada teman-teman

KORPRI yang setiap tahun selalu menyelenggarakan pelepasan sekaligus pembekalan kepada teman-teman yang akan berangkat haji. Dari kegiatan ini mudah-mudahan



*Irtama Sekretariat Jendral DPR RI Setyanta Nugraha*

teman-teman dilancarkan, kemudian diberikan kesehatan insya Allah ketika pulang kembali tetap sehat dan menjadi haji dan hajjah Maburr, Amin." harapnya.

Ditempat yang sama Ust. M. Yahya Irawan dalam tausiahnya mengingatkan kepada calon jema'ah haji untuk selalu menjaga mata, hati, lisan dan pikiran saat melaksanakan Ibadah Haji. Karena haji mengajarkan kita menghilangkan kesombongan, egois, takabur dan arogan.

"Jangan disia-siakan kesempatan ini, jangan lupa meminta maaf karena musibah apapun itu disebabkan oleh kelakuanmu sendiri, makanya dianjurkan sebelum berangkat jangan malu dan jangan sungkan untuk meminta maaf dan memaafkan mumpung masih hidup, tidak hina meminta maaf itu. Sesungguhnya Allah cinta orang yang bertobat dan membersihkan diri. Sempurnakan haji karena Allah. Jaga kesehatan. Surga tidak gratis tembusannya mahal,"ujarnya menutup pemberian pembekalan.

Adapun nama-nama yang akan menunaikan ibadah haji ialah Enden Adipati Koma (Inspektorat II), Taryono (Bag. Adm Keuangan), Muh. Basori (Bag. Televisi dan Radio Parlemen), Parino (Bag. BMN), Dra. Hartini Retnaningsih (Bag. P3DI) dan Istinah (Bag. Diklat).■

kemerdekaan ini," jelasnya.

Menurutnya, setiap tahun selalu mengadakan acara seperti ini, politisi Golkar ini berbaur dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi. Sebelumnya ia juga menggelar acara sama di daerah Klaten salah satu kota dapilnya, selain Boyolali, Solo, dan Sukoharjo, Endang mengaku harus berlaku adil dan merata, tidak pernah membedakan.

"Kegiatan hari ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tanggal 14 Agustus, dimana acara tersebut berlangsung sangat meriah. Ada berbagai lomba yang dipertandingkan, diantaranya lomba gendong-gendongan suami istri dan rias wajah Lomba ini memiliki sisi positif yaitu untuk menambah keharmonisan dan

merekatkan hubungan rumah tangga," tuturnya.

Antusias masyarakat mengikuti acara ini sangat besar, kepuasan yang dirasakan terpancar jelas di wajah mereka. Seperti yang dituturkan oleh salah satu anggota masyarakat Ibu Damayanti, "Harapan saya, semoga tidak hanya dilakukan sekali ini saja, tetapi bisa diadakan juga pada tahun-tahun berikutnya. Karena acara ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Antara pemimpin dengan masyarakat mestinya tidak ada jarak, seperti dengan keluarga," ujarnya.■

(tmg/imp), foto : anef/br.

(tmg) foto: gny/mr.

## Harga Rokok Dinaikkan, Sektor Industri Hancur

Banyak sektor industri yang hancur bila wacana kenaikan harga rokok diterapkan. Industri hulu hingga hilir akan mengalami guncangan hebat. Rokok sudah jadi kebutuhan primer bagi para perokok. Bila kebutuhan primer dinaikkan harganya, tidak saja memunculkan kemiskinan, tapi juga kriminalitas.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Selasa (23/8), di DPR RI. Wacana menaikkan harga rokok menjadi Rp50 ribu per bungkus, bisa mematikan industri perkebunan tembakau, pupuk, manufaktur, hingga mematikan kios-kios rokok kecil. "Merokok sudah jadi budaya nenek moyang kita sejak zaman kerajaan. Jangan sampai budaya ini hilang. Bahkan, mestinya kita bisa mengeksport tembakau," ungkap Bambang.

Cukai rokok, kata Anggota F-Gerindra ini, menempati pos penerimaan negara paling tinggi dalam APBN dan semuanya bersumber dari konsumen rokok kelas menengah ke bawah. Jumlah perokok aktif mencapai 40 persen dari penduduk. 80 persen dari mereka adalah kelas menengah ke bawah. Sisanya kelas atas.

Bila harganya dinaikkan, sambung Bambang, itu tidak serta merta menghentikan kebiasaan merokok. Para perokok tetap akan mempertahankan tradisi merokoknya walau harganya mahal. Dan yang rawan adalah ketika perokok kelas bawah tak mampu membeli rokok lagi.

Kemungkinan besar, mereka akan melakukan kriminalitas agar tetap bisa merokok. Jadi aspek sosial-ekonomi harus dipikirkan lagi menyangkut kebijakan ini.

Sedangkan kaitannya dengan faktor kesehatan, Bambang menampikannya. Merokok tidak membuat umur pendek. Justru dengan merokok ada relaksasi yang didapat. "Para perokok berat ternyata berumur panjang, karena tingkat stresnya rendah. Dengan merokok, mereka merasa lebih rileks," ungkap politisi dari dapil Jatim I itu. Dia menyebutkan para pemimpin dunia yang perokok berat, yaitu Mao Zetung dan Den Xioping wafat di atas usia 90 tahun. Bahkan, Fidel Castro pemimpin revolusioner Kuba masih hidup sampai sekarang, walau perokok berat.

Bambang sendiri mengaku bukan seorang perokok dan tak pernah merokok sejak kecil. Tapi, ia tak setuju bila harga rokok dinaikkan, karena bisa menggerus ekonomi rakyat kecil. Polusi rokok juga tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap

manusia. Yang sangat berpengaruh adalah polusi asap kebakaran hutan yang sampai sekarang belum mampu dikendalikan oleh pemerintah.

Sebaliknya, pemerintah justru harus mengembangkan industri tembakau di Tanah Air. Tembakau Indonesia sangat dikenal dan disukai masyarakat dunia. Rasa tembakau Indonesia sangat enak. Dan tembakau dari Deli, Sumatera Utara, merupakan tembakau terbaik di dunia.

"Jadi, pemerintah jangan kalap atau bingung dengan menaikkan harga rokok, karena tak bisa menyukkseskan pendapatan dari tax amnesty. Subsidi BBM dan listrik bagi rakyat sudah dicabut. Jangan menambah kesulitan baru bagi rakyat kecil,"

papar Bambang. ■



Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono

(mb) foto: Jakarta

## Legislator Tolak Revisi Jika Akomodasi Dwi Kewarganegaraan

Jika hanya untuk mengakomodir dwi kewarganegaraan, Anggota Komisi III DPR RI HR Muhammad Syafi'i menegaskan, Gerindra akan menolak rencana revisi UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Revisi UU Kewarganegaraan itu mencuat setelah mantan Menteri ESDM Archandra Tahar dan Anggota Paskibraka Gloria Natapraja Hamel diketahui memiliki paspor Amerika Serikat dan Perancis.

“ Kalau hanya dua kasus itu kemudian pemerintah dan DPR RI mau merevisi, sementara hal itu akibat kelalaian istana kepresidenan dalam merekrut pejabat publik. Padahal, dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara sudah tegas harus WNI,” tanya Syafi'i dalam forum legislasi 'Revisi UU

Kewarganegaraan' bersama anggota Komisi III DPR RI FPDI P Andreas Hugo Parera dan guru besar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (23/8).

Seharusnya kata Syafi'i, bukan merevisi, melainkan merapikan dan mendisiplinkan tugas-tugas di lingkungan istana

kepresidenan dalam merekrut pejabat negara. "Jangan seperti akrobatik. Dimana pejabat negara itu dibutuhkan nasionalisme, sehingga tidak harus menunggu proses seseorang menjadi WNI untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia," ujarnya.

"UU Kewarganegaraan ini sudah memadai. Sedangkan syarat tinggal 5 - 10 tahun agar menjadi WNI itu hanya agar merasakan nasioanalisme. Tapi, kalau naturalisasi terus-menerus, maka WNI akan makin terpinggirkan. Karenanya Gerindra akan tolak revisi kalau sekadar

untuk mengakomodir dwi kewarganegaraan. Jika asing makin banyak di negeri ini, maka akan cepat Indonesia terjual ke asing," pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Andreas Parera (F-PDIP) melihat masalah dwi kewarganegaraan itu sebagai fenomena diaspora yang terjadi secara universal. Dimana WNI yang ada di luar negeri dan menjadi WNA ingin kembali mengabdikan ke tanah airnya atas kemampuan yang dimiliki. "Ini bukan masalah baru. Tapi, akan berpengaruh besar untuk kemajuan suatu negara. "Kini ada 33 negara di dunia, yang warga negaranya menjadi negara asing. Khususnya dari Afrika, India, dan China yang pindah ke Eropa, Amerika Serikat, Jerman dan negara lain," tambahnya.

Pertanyaannya bagaimana agar



Anggota Komisi III DPR RI HR Mubammad Syafi'i dan Andreas Parera dalam forum legislasi di Media Center DPR RI

Indonesia bisa memanfaatkan WNI di luar negeri? "Maka kalau harus ada revisi, Indonesia harus tetap menganut sistem satu kewarganegaraan, bukan dwi kewarganegaraan. Meski hukum harus mengikuti perkembangan dunia karena dunia sudah berubah, dengan memberikan

hak-hak sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia. Kecuali hak politik," ungkap Andreas.

Dalam kesempatan tersebut, Hikmahanto menyatakan terkejut dengan pernyataan Presiden RI dan Ketua DPR RI, yang ingin memulangkan 74 professor di luar negeri, dengan merevisi UU Kewarganegaraan. "Padahal, tak ada kaitan

masalah Archandra dan Gloria dengan UU Kewarganegaraan. Bahwa kedudukan menteri, pejabat publik itu sebagai personifikasi negara, dan UU memerintahkan WNI. Kalau menjadi rektor UI itu tidak masalah," pungkasnya Hikmahanto. ■

(sa) foto : andri/br.

## DPR RI Gelar Kopi Darat dengan Netizen dan Blogger

Dalam rangka memeriahkan HUT DPR RI ke 71, Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan acara Kopi Darat bersama Blogger dan Netizen di Operation Room, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu, (24/8).

Acara tersebut mengusung tema "Bulan Legislasi DPR RI" yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany, Deputy Persidangan Damayanti, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Suratna dan Direktur CEPP UI Reni Suwarso.

Acara ini digelar untuk memberikan sosialisasi serta pengenalan kepada para blogger dan netizen tentang proses legislasi yang terjadi di DPR RI.

Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti mengatakan interaksi dengan blogger dan netizen di dunia maya memiliki gaya bahasa dan cara penyampaian yang unik dan menarik. Sehingga diharapkan dapat berperan sebagai saluran informasi tercepat dan akurat.

"Mereka diharapkan dapat berperan sebagai saluran informasi yang cepat, akurat, dan tepat mengenai tugas, fungsi dan kinerja lembaga DPR RI, khususnya fungsi legislasi," ujar Win, sapaan akrabnya.



Suasana acara Kopi Darat bersama Blogger dan Netizen di Operation Room, Gedung DPR RI

Ia pun berharap kegiatan ini dapat menjadi jembatan antara DPR RI dengan netizen dan dapat saling mengedukasi terkait informasi yang beredar di masyarakat. "Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara kedua belah pihak, yaitu DPR RI dan para blogger serta netizen dapat saling berbagi informasi dan saling mengedukasi terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat," ujarnya.

Melalui acara ini, Win memaparkan, hal

ini sebagai komitmen DPR RI untuk bertransformasi menjadi parlemen modern. Beberapa aspek penunjangnya yakni transparansi dan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung tugas DPR RI.

Melalui kegiatan ini Win berharap DPR RI bisa menjadi lebih baik lagi seiring keterbukaan informasi dan masukan dari masyarakat. "Harapan kita agar DPR RI lebih baik lagi. Kami

sangat butuh masukan dari masyarakat agar tercipta DPR RI yang lebih baik, dari segi legislasi dan lainnya," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, netizen dan blogger berkesempatan untuk berinteraksi dengan beberapa anggota DPR RI yakni: Akbar Faizal (F-Nasdem), Rieke Diah Pitaloka, Eva Kusuma Sundari, dan Budiman Sudjatmiko (F-PDIP), Meutya Hafid (F-Golkar), dan Dede Yusuf (F-Demokrat). ■

(sa) foto : arba/mr.

## Baleg Pertimbangkan RUU Jabatan PPAT Masuk Prolegnas Prioritas

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan mempertimbangkan usulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017. Salah satu yang menjadi urgensi berkaitan dengan keotentikan akta PPAT.

Demikian dikatakan Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, saat audiensi dengan IPPAT di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8). Politisi F-Gerindra itu mengatakan pihaknya akan mendalami urgensi RUU tersebut untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas tahun depan.

"Jadi ada dua pilihan, karena di dalam UU Pertanahan itu, satu-satunya pasal yang menyebut pejabat pembuat akta tanah hanya terdapat di pasal 52 ayat 6. Nah, ini menjadi dilematis dan bisa menjadi perhatian kita. Apakah memang ada urgensinya untuk diajukan sebagai RUU baru atau bisa menempel di dalam RUU Pertanahan," ungkap politisi asal dapil Sulteng itu.

Sementara itu sebelumnya, Anggota Baleg Ammy Amalia Surya sebagai pengusul RUU tentang Jabatan PPAT mengatakan urgensi dari RUU ini, karena adanya multitafsir terhadap akta PPAT.

"Padahal, akta PPAT merupakan dokumen pertanahan yang penting karena semua pencatatan mengenai hak milik dan peralihan hak atas tanah itu tercatat

didalamnya," ungkap Ammy.

Politisi F-PAN itu menambahkan, adanya perbedaan persepsi terkait akta PPAT itu, menjadi salah satu penyebab berbagai permasalahan sengketa tanah yang terjadi selama ini. Sebab, masih banyak penegak hukum yang tidak mengakui akta PPAT adalah akta otentik, walaupun sudah disebutkan dalam PP No 24 Tahun 2016 yang menyatakan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik.

"Bahkan yurisprudensinya juga masih sering digunakan apabila terjadi sengketa tanah. Nah, kalau bukan otentik, berarti sifatnya masih akta bawah tangan, ini yang menjadi permasalahan. Karenanya, saya mengusulkan bahwa multitafsir ini kita jadikan satu tafsir bahwa akta PPAT sama seperti notaris, dengan meningkatkan PP menjadi UU," jelas politisi asal dapil Jawa



Ketua Baleg Supratman Andi Agtas

Tengah itu.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum PP IPPAT Syafran Sofyan. Syafran mengungkapkan, dibutuhkan persamaan persepsi mengenai akta yang dikeluarkan PPAT. Pasalnya, masih banyak penegak

hukum yang merujuk pada Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan akta otentik adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diatur oleh Undang-Undang. Sementara, PPAT hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Baik dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim masih banyak yang tidak mengakui apakah akta PPAT ini otentik atau bukan. Padahal yang kita lakukan itu nilainya jauh lebih besar dari akta notaris yang hanya mencapai seperlima dari akta PPAT," katanya. ■

(arns/nt) Foto: Jeyadi



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

## Anggota Dewan Sampaikan Duka Cita atas Pembunuhan Guru di Bandung

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI menyampaikan rasa duka cita yang mendalam, atas meninggalnya Tatang Wiganda, seorang guru SMP dan SMA Yas Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, ini adalah kejadian yang tak bisa ditolerir sama sekali.

"Ini sangat miris. Seorang guru yang niatnya luar biasa untuk mendidik murid, malah mengalami penusukan dari pelaku yang tak bertanggung jawab. Ini merupakan kejahatan yang tidak bisa kita tolerir," tegas Sutan, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

## Terminal 3 Ultimate Harus Jadi Jawaban Masalah di Bandara Soetta

Anggota komisi V DPR Neng Eem Marhamah Zulfa menegaskan, Terminal 3 Ultimate harus menjadi jawaban bagi pemenuhan kebutuhan dan solusi dari berbagai masalah yang timbul karena adanya peningkatan pengguna jasa transportasi pesawat terbang di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

“Terminal 3 Ultimate harus menjadi jawaban, sebab *overload* yang di terjadi di Terminal 1 dan 2 menimbulkan berbagai persoalan, seperti kemacetan, delay, dan lain sebagainya,” ujar Neng Eem usai melakukan kunjungan spesifik bersama Komisi V ke Terminal 3 Ultimate, Selasa (23/8).



Anggota Komisi V Neng Eem Marhamah Zulfa bersama Tim Komisi V

Anggota Dewan dari F-PKB itu juga menyatakan bahwa kedatangan Komisi V DPR ke Terminal 3 Ultimate adalah sebagai kunjungan bukan sidak, sehingga segala sesuatunya yang dipantau di lokasi

terlihat lebih baik dan teratur.

"Padahal berdasarkan informasi yang diterima sebelumnya, kondisi Terminal 3 Ultimate itu sempat mengalami beberapa masalah, seperti tergenang banjir dan juga masalah

sampah. Tetapi saat kita kunjungi semuanya terlihat lebih baik dan rapi," tuturnya.

Meskipun ia merasa pembukaan Terminal 3 tersebut agak dipaksakan, tetapi mengingat sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, ia berharap Angkasa Pura II bisa menjadikan kejadian itu sebagai bahan pelajaran ke depan.

"Semoga kejadian kemarin itu menjadi pelajaran untuk Angkasa Pura II agar bisa berbenah, karena seharusnya uji coba itu dilakukan tidak hanya ketika cuaca bagus, tetapi juga saat hujan deras, hingga dapat mengantisipasi ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan," pungkasnya. ■

Di satu sisi, politisi F-Gerindra itu mengucapkan rasa terima kasihnya atas pengabdian guru Tatang Wiganda. Ia berharap, seluruh amal kebaikan almarhum di terima oleh Allah SWT, dan diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima di sisi-Nya.

"Beliau selaku pejuang pendidikan, diberikan tempat yang terbaik oleh Allah SWT. Dan segala amal ibadahnya yang luar biasa, semoga dilipatgandakan oleh Allah. Dan keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Karena dibalik ini semua, pasti ada rahasia Allah yang terbaik untuk semua," imbuh Sutan.

Sutan meminta kepada penegak hukum agar segera mengusut kejadian ini, dan menjerat pelaku dengan

hukuman yang setimpal. Ia berharap, kejadian yang tak diinginkan ini, jangan sampai lagi melanda dunia pendidikan Tanah Air.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar DPR RI dapat membuat payung hukum terkait perlindungan guru. Apalagi, beberapa kasus penganiayaan guru juga marak terjadi akhir-akhir ini, Dengan adanya landasan hukum untuk melindungi guru, selain guru mendapatkan perlindungan sebagaimana dalam UUD 1945, guru juga akan lebih merasa aman dan nyaman.

"Tanpa adanya guru, tidak mungkin kita bisa sampai seperti ini. Untuk itu, ini akan lebih spesifik untuk melindungi guru, dengan cara kita buat UU perlindungan guru. Apalagi, masalah

terus terjadi, sehingga harus ada solusinya," tegas politisi asal dapil Jambi itu.

Seperti dilansir sebuah media online, Tatang diketahui tewas di keroyok sejumlah orang di Jalan A.H. Nasution, Bandung, Senin (22/8) sore lalu, dengan sejumlah luka tusukan benda tajam di tubuhnya.

Korban dikeroyok tiga orang tak dikenal. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Santo Yusuf untuk diberikan pertolongan oleh warga yang melihat korban terkapar. Namun, akhirnya nyawa korban tak terselamatkan. Hingga berita ini diturunkan, pihak berwajib telah menangkap dua orang terduga pembunuh. ■

(dep.mp), foto: oajfu.br.

(9) Foto: Rizka/mr.

## Anggota Banggar Nilai RAPBN 2017 Cukup Optimis

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 telah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Anggota Badan Anggaran DPR RI, Dony Ahmad Munir menilai RAPBN 2017 yang disusun pemerintah cukup optimis. Setidaknya dari sisi asumsi makro, terlihat bahwa ada kenaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga tetap rendah.

“ Kalau target seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai, tentu sebuah perkembangan yang menggembirakan bagi ekonomi kita. Sebab ekonomi global masih melemah, tetapi ekonomi kita justru masih meningkat. Meski demikian, kita tidak boleh berpuas diri, karena gejolak eksternal masih berpotensi mengganggu kinerja ekonomi kita,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Meski demikian, tambah politisi F-PPP itu, kondisi makro ekonomi yang kian membaik, ternyata belum mampu mendorong perkembangan sektor riil dan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.

"Seharusnya dengan inflasi yang menurun dan pertumbuhan yang cukup tinggi bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara lebih cepat. Untuk itulah kualitas pertumbuhan ekonomi harus terus ditingkatkan sehingga kemampuan menekan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi lebih baik," jelas Dony.

Politisi asal Dapil Jawa Barat IX itu juga menekankan, RAPBN 2017 harus bisa menjadi instrumen fiskal untuk menekan kemiskinan dan pengangguran. Mengingat saat ini daya beli masyarakat terus merosot, terutama rakyat kecil seperti petani dan nelayan.

"Hal ini harus memperoleh



Anggota Badan Anggaran DPR RI Dony Ahmad Munir

perhatian pemerintah karena sektor lain seperti kinerja ekspor dan impor serta investasi juga belum sepenuhnya membaik," imbuh politisi yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu.

Sebagaimana diketahui dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 juga menargetkan penerimaan negara sebesar Rp1.737,6 triliun, atau lebih rendah dari target APBN 2016 yang sebesar Rp1.822,5 triliun. Dari total target penerimaan tersebut penerimaan perpajakan sepanjang 2017, ditetapkan Rp1.495,9 triliun, atau turun sebesar Rp 50,8 triliun dari target APBN 2016, yang sebesar Rp1.546,7 triliun.

Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Jokowi menargetkan Rp240,4 triliun, atau diturunkan Rp33,4 triliun dari target PNBP 2016 yaitu Rp273,8 triliun.

Sementara itu, untuk belanja negara dalam RAPBN 2017, pemerintah akan mengalokasikan

sebesar Rp2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760 triliun.

Ekonomi tahun depan, tampaknya memberikan harapan lebih optimis. Optimisme itu terlihat dari asumsi makro yang disusun pemerintah yakni pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,3 persen, tingkat inflasi sebesar 4,0 persen, nilai tukar rupiah dipatok Rp13.300 per dolar AS, dan suku bunga

SPN-3 bulan sebesar 5,3 persen. Kemudian, harga minyak internasional 45 dolar AS, lifting minyak 780 juta barel/hari; dan lifting gas 1,15 ribu barel setara minyak/hari.

Menurut Presiden, dengan memperhitungkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi Indonesia ke depannya, pemerintah mengajukan asumsi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 diperkirakan dapat mencapai 5,3 persen.

"Adapun dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah mengakui perlu kerja yang sangat keras, mengingat ketidakpastian bersumber dari pelambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara maju belum sesuai harapan," jelas Presiden. ■

(9) Foto: Jakadmir



Ketua Komisi V Fary Djemy Francis beserta Tim saat meninjau Terminal 3 ultimate Bandara Soetta.

## Beberapa Item Safety dan Security Terminal 3 Ultimate Belum Lengkap

Ketua Komisi V Fary Djemy Francis yang memimpin langsung kunjungan kerja spesifik ke Terminal 3 Ultimate, Bandara Soekarno Hatta, meminta agar segala kekurangan yang berkaitan dengan sertifikasi safety dan security yang ada terminal bandara tersebut, segera dilengkapi dan ditindaklanjuti.

“Setelah kita lakukan peninjauan, masih ada beberapa item yang berkaitan dengan sertifikat safety dan security nya yang belum terpenuhi. Untuk itu kita minta pada masa uji coba ini harus segera dilengkapi dan ditindaklanjuti,” paparnya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (23/8).

Fary juga menyampaikan bahwa Komisi V ingin memastikan tentang hasil sertifikasi pengoperasian Terminal 3 Ultimate. Pada kesempatan tersebut, ia bersama anggota dewan yang lain juga menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan berbagai item yang disertifikasi apakah sudah dilengkapi.

Dikatakannya, berdasarkan penjelasan yang diterima oleh Komisi V, terminal domestik yang sudah beroperasi telah

memenuhi standar. Akan tetapi masih ada beberapa item yang belum terpenuhi, seperti peralatan safety untuk penanganan kebakaran.

"Masih ada beberapa item yang belum dapat difungsikan, terutama di area terminal internasional. Kita juga mempertanyakan seputar fasilitas lainnya, seperti tentang *air conditioner* (AC) di ruang *check in* yang belum memenuhi standar, karena masih diatas 25 derajat celcius," ungkapnya.

Selain itu Komisi V juga mengkritisi masalah standar pelayanan antrian yang masih memakan waktu 12 menit per orang, padahal standarnya adalah 7 menit per orang.

"Item-item inilah yang kita minta untuk segera ditindaklanjuti, sehingga hasilnya bisa mencapai standar internasional. Hal lain yang menjadi sorotan, mengenai papan petunjuk arah untuk para penumpang yang masih belum begitu banyak, sehingga masih banyak penumpang yang bertanya-tanya. Begitu pula dengan sistem *drainase* yang masih perlu dilakukan pembenahan," ucap politisi dari F-Gerindra tersebut.

Komisi V rencananya akan membahas dan menindaklanjuti masalah ini, pada saat rapat kerja selanjutnya dengan Menteri Perhubungan. ■

(dep), foto : afdia/br.

# JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344  
@dpr\_ri DPR RI @DPR\_RI DPR RI



Ketua DPR RI Ade Komarudin menghadiri malam puncak HUT 26 SCTV di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (24/8) Foto : Naefuroji

Komisi III DPR RI menggelar seminar dan FGD dengan tema “Evaluasi dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional” di Gedung DPR RI, Selasa (23/8) Foto : Andri



Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN yang diwakili Menkeu dipimpin Wakil Ketua Dodi Alex Noerdin perihal privatisasi terhadap empat BUMN, Rabu (24/8) Foto : Jaka